

**IMPLEMENTASI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Ni Made Celin Darayani, NIM 1914101018

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berupa pengadaan rumah jaminan sosial di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa hambatan yang dialami oleh para pemangku kepentingan terkait upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sampai saat ini Kabupaten Buleleng belum memiliki rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) UU SPPA, sehingga implementasinya belum optimal karena anak korban kekerasan seksual ditempatkan pada shelter sementara (LKSA berupa panti asuhan) dan (2) adanya hambatan yang dialami para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak (Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Pendamping Anak dan Pekerja Sosial) dalam upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual adalah hambatan dari ketersediaan regulasi dan shelter terpusat, serta masalah anggaran dana untuk pengadaan rumah perlindungan sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak, Korban Kekerasan Seksual, Rumah Perlindungan Sosial, Sistem Peradilan Pidana Anak.

**IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION HOUSE TO FULFILL
THE RIGHTS OF CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE
JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN BULELENG REGENCY**

By:

Ni Made Celin Darayani, NIM 1914101018

Law Department

ABSTRACT

This study aims to (1) know and analyze the implementation of article 91 paragraph (4) of the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA Law) in an effort to fulfill the rights of child victims of sexual violence in the form of providing social security houses in Buleleng Regency, and (2) know and analyze obstacles experienced by stakeholders related to efforts to fulfill the rights of child victims of sexual violence in the juvenile criminal justice system in Buleleng Regency. The type of research used is a type of empirical legal research using the nature of descriptive research. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques, and interview techniques. The sampling technique used is a non-probability sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling techniques. Furthermore, the data obtained are processed and analyzed qualitatively. The results showed that (1) until now Buleleng Regency does not have a social protection house as referred to in article 91 paragraph (4) of the SPPA Law, so its implementation has not been optimal because child victims of sexual violence are placed in temporary shelters (LKSA in the form of orphanages) and (2) there are obstacles experienced by stakeholders in the juvenile criminal justice system (Judges, Public Prosecutors, Investigators, Child Companions and Social Workers) in an effort to fulfill the rights of child victims of sexual violence are obstacles to the availability of centralized regulations and shelters, as well as budget problems for the procurement of social protection homes.

Keywords: *Legal Protection, Children's Rights, Victims of Sexual Violence, Social Protection Homes, Juvenile Criminal Justice System.*